

KOMUNIKASI POLITIK SULTANAH SAFIATUDDIN ACEH

Muarrief Rahmat

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

muarrief.rahmat@gmail.com

***Abstract:** The leadership of Sultanah Sri Ratu Safiatuddin has given birth to new values related to the presence of women in the power of the Kingdom of Aceh Darussalam. Through his policies, he has contributed greatly to a new perspective in the political history of Aceh. His collaborative policies have provided opportunities for everyone to be involved in the Aceh Darussalam government system regardless of background, especially gender. This paper attempts to unravel and analyze Ratu Safiatuddin's pattern of political communication regarding his policies that led to the trust of the Acehnese people at that time to be led. Among them include policies in the field of science and knowledge, strengthening the law, freedom of opinion, and gender equality. The results of this study show that through this policy the Queen can survive in a span of 35 years and even continues with three queens' leadership in the next period. Ratu has contributed new ideas for the fulfillment of the value of the existence of Islam and science.*

***Keywords:** Sultanah, Aceh, Political Communication*

Abstrak: Kepemimpinan Sultanah Sri Ratu Safiatuddin telah melahirkan nilai baru terkait kehadiran perempuan dalam kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Melalui kebijakan-kebijakannya ia telah memberikan sumbangsih amat besar terhadap pandangan baru dalam kancah sejarah perpolitikan di Aceh. Kebijakannya yang kolaboratif telah memberi peluang bagi setiap kalangan untuk terlibat dalam sistem pemerintahan Aceh Darussalam tanpa memandang latar belakang, khususnya gender. Tulisan ini berupaya mengurai dan menganalisa pola komunikasi politik Ratu Safiatuddin perihal kebijakan-kebijakannya yang mengarah pada kepercayaan masyarakat Aceh pada masa itu untuk dipimpin. Diantaranya mencakupi kebijakan bidang ilmu dan pengetahuan, penguatan hukum, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan gender. Hasil dari penelitian ini menunjukkan melalui kebijakan ini Ratu dapat bertahan dalam rentang waktu 35 tahun bahkan berlanjut dengan tiga kepemimpinan ratu pada periode berikutnya. Ratu telah memberi sumbangsih pemikiran baru bagi pemenuhan nilai keberadaan Islam dan ilmu.

Kata kunci: Sultanah, Aceh, Komunikasi Politik

A. Pendahuluan

Menjadi pemimpin dalam tataran pemerintahan dalam perkembangannya didominasi oleh kaum laki-laki, oleh karenanya tentu tidak mudah menjadi pemimpin perempuan dalam kondisi ini. Terkhusus, saat penunjukkan Putri Safia menjadi Sultanah pertama di Kerajaan Aceh Darussalam yang bergelar Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Shafiatuddin Johan Berdaulat (1641-1675) menggantikan suaminya yaitu Sultan Iskandar Thani yang meninggal dunia¹. Meskipun penunjukkan ini disetujui oleh Kadi Malikul Adil dan Anggota Balai Gading, namun penolakannya menjadi Ratu terus menggema selama rentang waktu 35 tahun oleh kelompok wujudiyah yang diduga disusupi oposisi penguasa kala itu².

Rentang waktu yang lama ini menjadi menarik untuk dikaji, bagaimana pola komunikasi politik yang dibangun Safiatuddin baik untuk teman politiknya hingga lawan politiknya. Pada masa itu masih populer bahwa yang layak menjadi pemimpin adalah kaum lelaki, sementara perempuan diposisikan berada pada urusan rumah tangga saja³. Namun fakta yang berbeda, justru sejarah juga mencatat sejak lama Aceh telah terkenal dipimpin oleh perempuan baik di darat oleh para Sulthanah maupun di laut oleh Laksamana Malahayati yang ditunjuk langsung oleh Sultan Alaidin Riayat Syah al-Mukammal (1589-1604). Artinya peran perempuan dalam tata pemerintah di Aceh telah berlangsung lama, maka ketika diangkatnya Sultanah Sri ratu Safiatuddin hingga tiga Sultanah berikutnya peristiwa sejarah yang luar biasa.

Pada faktanya, Kerajaan Aceh Darussalam senantiasa berjaya meskipun kepemimpinan paling agung ini dikendalikan oleh ratu sejak tahun 1641 hingga tahun 1699⁴. Menurut Sher Banu A.L. Khan dalam kajiannya ia menyebutkan bahwa kepemimpinan ratu berbeda dengan raja. Ia menambahkan bila pada masa Aceh dipimpin oleh laki-laki kentara memunculkan sosok pemimpin yang kharismatik dan terus menampilkan keunggulan raja. Hal ini berbeda dengan

¹ Raden Hoesein Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh*, (Daerah Istimewa Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982/1983), h. 56.

² A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Di Bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 48-49

³ Ibnu Musthafa, *Perempuan Islam Menjelang Tahun 2000*, (Bandung: Al-Bayan, 1993), h. 60

⁴ Rusdi Sufi, *Sultanah Safiatuddin Syah, Perempuan Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Jayakarta Agung, 1994), hlm. 42.

pola kepemimpinan sultanah yang memerintah dengan kehendaknya, otoritas mereka dihormati dan diterima oleh kalangan laki-laki. Pembagian kekuasaan yang dijalankan ratu dianggap sebagai pendekatan kolaboratif meskipun sepintas seolah membatasi kekuasaan absolut kerajaan, namun Sher Banu menyebut gaya kepemimpinan seperti itu sangat cocok untuk menjembatani sebagai fasilitas perdamaian, penguatan perdagangan, dan diplomasi yang menjadikan ekonomi Aceh berjaya pada masa itu⁵.

Gaya kolaboratif seperti ini menunjukkan bahwa ratu mengakomodir setiap kepentingan dalam kekuasaannya. Saat Qadhi Malikul Adil dijabat oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri terjadi perbedaan kentara kepada Hamzah Al Fansuri hingga pengikutnya. Namun, ketika Ratu Syafiatuddin mengangkat Syekh Abd Al-Ra'ûf Bin Alî Al-Jâwî Al-Fansurî Al- Sinkilî atau dikenal dengan Syiah Kuala menjadi Qadhi Malikul Adil yang tidak terlalu mempersoalkan kontroversi paham wujudiyah walaupun ia sebenarnya tidak sepenuhnya setuju dengan paham tersebut.⁶

Berdasarkan catatan sejarah, kebijakan-kebijakan Sultanah Safiatuddin menjadi pemantik ia dapat bertahta hingga 35 tahun. Diantaranya, dalam sektor perpolitikan, Safiatuddin merumuskan kembali Qanun Meukuta Alam atau Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam.⁷ Qanun ini tidak hanya menjadi pegangan Kerajaan Aceh Darussalam, bahkan menjadi pegangan utama bagi kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Asia Tenggara. Selain mengenai qanun ini, pada masa Safiatuddin juga menjadikan Aceh sebagai jalur niaga kaliber dunia yang menjadi penyambung dua pusat kebudayaan besar lainnya yaitu India dan Cina. Sektor perekonomian lainnya juga ditandai adanya penggunaan mata uang yang dinamai *derham* sebagai mata uang resmi kerajaan. Hal ini karena berlimpahnya temuan tambang emas, hingga hiasan bangunan Masjid Raya Baiturrahman dan keranda jenazah suaminya dihiasi emas.

⁵ Toto Haryanto, *Konstruksi Politik Atas Kepemimpinan Perempuan: Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17*, Jurnal Studi Islam Medina, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 5.

⁶ Toto Haryanto, *Konstruksi Politik Atas Kepemimpinan Wanita : Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17*, Medina-Te: Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 139.

⁷ Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)).

Terkait bidang sosial, Safiatuddin telah mengangkat derajat kaum perempuan. Diantaranya bahwa perempuan boleh bekerja di lembaga negara, adanya undang-undang yang menaikkan derajat perempuan, serta adanya peraturan penyediaan rumah bagi anak perempuan. Pada masa itu, kegiatan keagamaan pula dipusatkan di *meunasah-meunasah*, baik pembayaran zakat hingga musyawarah keagamaan. Tentu, diantara sekian banyak kebijakannya yang dianggap sangat kolaboratif, pembangunan Jami'at Bait al-Rahman telah menjadi pusat pendidikan kala itu. Dengan berlabel universitas semua kalangan didorong untuk belajar. Terutama kaum perempuan amat diperhatikan pemenuhan keilmuannya.

Melihat beragam kebijakan yang dijalankan Ratu Safiatuddin, maka penting bagi masyarakat masa kini memahami bagaimana pola komunikasi politik ini dibangun Safiatuddin sehingga ia dapat bertahta 35 tahun lamanya? Penulis mencoba menguraikan lebih dalam melalui penulisan karya ilmiah ini.

B. Konseptual / Teori

1. Komunikasi Politik

Mengacu pada khazanah terminologi komunikasi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *communico* diartikan membagi, sementara *communis* memiliki arti membina kebersamaan baik dua orang atau lebih. Selain itu, dikenal pula kata *communicare* ini diartikan 'menjadikan sama'. Berpedoman pada bahasa Inggris, kata *communication* sebenarnya berasal dari bahasa Latin pula, ragam *communis* yang kita kenal misalnya kata *communico*, *communication*, dan *communicare* mempunyai arti yang sama. Maka, komunikasi sebenarnya mengarahkan keberpihakan makan, pikiran hingga pesan digunakan secara sama.⁸ Masih berdasarkan pendapat Miller, Aristoteles yang hidup rentang tahun 385-322 SM sebagai pendefinsi pertama komunikasi dalam bukunya *Rethoric*, yaitu "siapa mengatakan apa kepada siapa".⁹ Sehingga, melalui penjelasan ini telah memberi pemahaman ahli komunikasi dan politik Harold D. Lasswell di tahun 1948 menjabarkannya menjadi "siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan apa akibatnya." Teori-teori komunikasi yang telah berkembang sejauh ini tak

⁸ Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 4.

⁹ K. Miller, *Communication Theories; Perspectives, Processes, and Conteexts*, hlm. 5..

bisa dilepaskan dari ahlinya. Mereka telah mengelaborasi konsep komunikasi dalam beragam disiplin keilmuan. Kendati demikian, konseptual komunikasi tetaplah menjadi pemicu utama lahirnya ilmu-ilmu lain yang masih bersinggungan dengan komunikasi. Misalnya, berdasarkan kajian yang berkembang teori komunikasi kebanyakan amat banyak bersisian dengan kajian politik.¹⁰

Sebagai upaya mengedepankan pandangan ini, dalam tataran epistemologis kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* diartikan negara kota atau kota. Penafsiran ini selaras dengan konsepsi Smith yang menyatakan bahwa politik adalah serangkaian tindakan yang mengarahkan dan menata masalah publik.¹¹ Pembahasan lebih konseptual terkait ini menimbulkan kesinambungan dua kajian keilmuan. Konsep disiplin komunikasi politik tidak bisa dilepaskan dari adanya pengaruh pesan dari aktor politik terhadap kebijakan yang disampaikannya. Oleh karenanya, pandangan McNair ia menguraikan bahwa komunikasi politik membicarakan adanya alokasi sumber daya publik yang mempunyai nilai, baik nilai kekuasaan atau ekonomi, petugas yang berwenang memberi kebijakan pada keputusan saat pembuatan Undang-Undang, peraturan, legislatif maupun eksekutif dan hukuman-hukuman berupa hadiah hingga denda.¹²

Oleh karena itu, pendefinisian komunikasi politik dapat diartikan sebagai sebuah fungsi yang mutlak dibutuhkan selamanya dalam skema perpolitikan. Pembuatan kebijakan-kebijakan yang penuh politis juga tetap berkaitan erat dengan isu-isu maupun pesan politik sehingga menjadikannya dekat dengan ilmu komunikasi.

Secara lebih lanjut, komunikasi politik mempunyai karakteristik yang dapat memberi penegasan terkait pola kebijakan pada masyarakat multikultural, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai kebijakan pemerintah. Unsur-unsur ini memberikan penguatan terkait pola komunikasi politik yang dibangun oleh aktor politik. Komunikasi politik merupakan pembicaraan politik yang melibatkan unsur-unsur komunikasi dengan akibat-akibat politik tertentu.¹³

¹⁰ K. Miller, *Communication Theories; Perspectives, Processes, and Contexts*, 2nd Ed, New York: McGraw-Hill, 2005, hlm. 3.

¹¹ Zaenal Mukarom, *Komunikasi Politik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, hlm. 35

¹² Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm.

¹³ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media*, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 8-9

a. Komunikator

Peranan komunikator dalam komunikasi politik mempunyai peranan strategis sebagai penggiring dan pembentuk opini masyarakat. Hal ini bertujuan mengarahkan pada pengertian bersama antar setiap komponen terkait pembicaraan proses negosiasi. Maka, pesan atau nilai antar tiap komponen memerankan dan bertindak bersama-sama.

b. Pesan

Terkait dengan pesan komunikasi ini dapat menjadi cara menyampaikan pesan oleh komunikator melalui kebijakan atau nilai sehingga memberikan efek tertentu bagi komunikan.¹⁴ Pernyataannya yang menjadi kebijakan tertentu baik berupa ide, informasi, keluhan, keyakinan, himbauan ajuran dan lainnya. Semuanya bertujuan untuk memberi pengaruh pada orang lain.

c. Media

Saluran komunikasi berupa wadah pesan baik secara kombinasi maupaun simbolik dengan teknik dan ruang media tertentu.¹⁵ Jika melihat pada masa Sultanah Safiatuddin, media dapat berupa lisannya sendiri maupun melalui pendampingnya. Media komunikasi ini dapat memudahkan komunikator dalam menyampaikan pesan. Oleh karena itu, dalam pengertian lainnya saluran komunikasi berupa pengertian bersama tterkait siapa berbicara kepada siapa, dalam keadaan bagaimana serta sejauh mana dapat diaku kebenarannya. Tentu ini bukan sekadar titik sambungan saja.

d. Khalayak

Arthur F. Bentley dalam bukunya *The Process of Government* sebagaimana dikutip Dan Nimmo memberikan pengertian yang mengarah pada pemahaman tentang khalayak sebagai bagian tertentu dari orang-orang dalam masyarakat yang diperlakukan tidak sebagai massa fisik yang terpisah dari masa yang lain, tetapi sebagai “kegiatan massa yang tidak menghalangi orang yang berpartisipasi di

¹⁴ Nizam, K. (2021). The Role And Authority Of Queen Of Aceh And Sultan Of Perak To Deal With The Dutch In The Tin Trade Issues. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(1), 1-14.

¹⁵ Gea, Z. S., Zulyadi, T., & Nurfahmi, N. (2022). The Effectiveness of The Role of The Special Job Fair SMK SMTI Banda Aceh in Enhancing Graduates Employability to The Business/Industry World. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 5(1), 51-62.

dalamnya untuk berpartisipasi juga dalam banyak kegiatan kelompok yang lain”. Jalaluddin Rakhmat menjelaskan pengertian khalayak dengan sejumlah orang yang heterogen. Mereka menjadi khalayak komunikasi politik segera setelah mereka “mengkristal” menjadi opini publik.

e. Efek

Sebuah pesan yang disampaikan tentu memberi efek terhadap pesan tersebut. Komponen ini menjadi sisi penting adanya proses komunikasi. Beragam dampak yang ditimbulkan selalu berawal dari unsur kognitif yaitu melalui langkah pengetahuan dari tidak mengetahui menjadi memahami. Tahapan berikutnya bahwa unsur afektif terkait adanya rasa emosional baik senang, marah, sedih, simpati, empati. Terakhir, aspek konatif berupa aksi, tindakan, kegiatan, serta perilaku terkait pesan yang mempengaruhi khalayak.

2. Sultanah Safiatuddin

Secara silsilah keturunan, Sultanah Safiatuddin dapat dirincikan sebagai berikut: Sri As-Sulthanah Tajul Alam Safiat ad-Din Syah Binti Sultan Iskandara Muda Meukuta Alam Bin Laksamana Malik Abdul Kahhar Bin Sulyan Johan Ali Ibrahim Mughayat Syah Bin Sultan Salahuddin Syamsyu Syah Bin Malik Munawwar Mahmud Syah Bin Sultan Al ad-Din Abdullah Malikh Mubin.¹⁶

Usai mangkatnya Sultan Iskandar Thani sebagai Sultan Kerajaan Aceh Darussalam, maka pembesar negara dan ulama bermusyawarah menentukan penggantinya. Melalui persetujuan Kadli Malikul Adil dan Balai Gading, hal ini dirumuskan dan menetapkan Putri Safiatuddin sebagai Raja yang. Ia memiliki gelar Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat yang memerintah dari tahun 1641 hingga 1675. Ia menjadi perempuan pertama memimpin Kerajaan Aceh Darussalam.¹⁷

Jika melihat masa kecilnya, Sultanah Safiatuddin adalah seseorang putri kerajaan yang amat senang dengan ilmu pengetahuan. Di Istana kerajaan, bersama

¹⁶ Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Islam Histori: Dinamika Studi Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Percetakan Galang Press, 2017, hlm. 309.

¹⁷ A.Hasjmy, *59 Tahun Aceh ...*, hlm. 49.

dengan putra-putri ulama besar kerajaan baik Syekh Nuruddin Ar-Raniry dan Hamzah Fansuri. Dalam keadaan demikian, ia berkembang dengan baik terutama mampu mempelajari bahasa Arab, Persia, Spanyol, dan Urdu dengan baik. Begitu pula, ia juga menguasai ilmu fiqh, sejarah, mantik, falsafah, tasawuf, dan sastra.¹⁸

Maka amat wajar, jika saat memimpin Kerajaan Aceh Darussalam ia menumpahkan seluruh tenaganya pada ilmu pengetahuan, terutama ia memerintahkan untuk adanya peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dalam masa kepemimpinannya. Berdirinya Universitas Baiturahman serta adanya dayah-dayah di seantero Aceh karena kebijakannya. Pun dengan para ulama yang berseberangan dengannya, Sultanah Safiatuddin tetap memberikan kesempatan untuk menyebarkan pemahamannya.

Selama rentang waktu 35 tahun memimpin Kerajaan Aceh Darussalam, Sultanah Safiatuddin mampu memimpin dan menjaga kerajaan dari pengaruh Belandar. Tepatnya tanggal 23 Oktober 1675, Sultanah Safiatuddin meninggal dunia dan digantikan oleh penerusnya yang telah ia persiapkan jauh-jauh hari, yang bernama Nurul Alam Naqiyatuddin Syah. Penobatannya pula sama seperti kasus di awal penobatan Sultanah Safiatuddin yang dipenuhi berbagai spekulasi dan intrik para oposisi kerajaan yang tak senang dengan pola kepemimpinan ratu.

C. Metode Penelitian

Aspek penulisan dalam penelitian ini didasarkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, melalui metode penelitian sejarah dengan merekonstruksi kejadian terdahulu yang terjadi pada masa kerajaan Aceh di abad ke 17. Terkhusus dalam periode pemerintahan Sultanah Safiatuddin. Mengenai pengumpulan data berdasarkan pada uraian deskriptif naratif yang menjelaskan dampak dari peristiwa sejarah meliputi struktur dan prosesnya. Kajian penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), mencakupi pada acuan sumber penelitian mengenai kajian literatur.

D. Hasil dan Pembahasan

Keberadaan Sultanah Safiatuddin sebagai ratu pertama dalam Kerajaan Aceh Darussalam memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan

¹⁸ Ali Hasjmy, *59 Tahun Aceh...*, hlm. 125

pemerintahannya. Dalam rentang waktu 35 tahun, ia dianggap berhasil menyakikan masyarakat akan kepemimpinannya. Meskipun beragam serangan dari kaum wujudiyah terus menghampiri perodesasi kepemimpinnya.

Jalaluddin Rakhmat mengutip tulisan Aristoteles pada lebih dari 2000 tahun yang lalu bahwa persuasi tercapai karena karakteristik personal pembicara, yang ketika ia menyampaikan pembicaraannya kita menganggapnya dapat dipercaya. Kita lebih percaya pada orang-orang baik daripada orang-orang lain; Ini berlaku umumnya pada masalah apa saja dan secara mutlak berlaku ketika tidak ada kepastian (yang mungkin) dan berbagi pendapat. Tidak benar anggapan sementara penulis retorika bahwa kebaikan personal yang diungkapkan pembicara tidak berpengaruh apa-apa pada kekuatan persuasinya; sebaliknya, karakternya hampir bisa disebut sebagai alat persuasi yang paling efektif yang dimilikinya.¹⁹ Memahami pernyataan ini sehingga menjadi menarik, ketika menelaah kebijakan-kebijakan yang diambil olehnya bersama para pembesar kerajaan. Melalui kebijakan ini, ia dapat bertahta, membangun citra dengan komunikasi politiknya, dan memberi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, penguatan hukum, kebebasan berpendapat, serta kesetaraan gender.

1. Ilmu Pengetahuan

Jauh sebelum berdirinya Komplek Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, sebenarnya Safiatuddin telah mendirikan Universitas Baiturrahman atau dikenal pula dengan sebutan Jami'at Bait al-rahman. Di pusat pendidikan tinggi ini, pendiriannya dimaksudkan untuk mewadahi kaum laki-laki maupun perempuan. Bandar Aceh sebagai pusat peradaban dan perdagangan telah menjadi pusat ilmu pengetahuan, maka adanya ruang bagi perempuan dan laki-laki ini secara langsung Ratu telah mengakomodir semua kalangan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Melalui pendirian universitas ini pula, Ratu mempunyai perhatian lebih terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Maka tak salah di masa itu menjadi masa kejayaan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan catatan sejarah yang dirangkum A. Hasymy, "Pola pendidikan di kerajaan Aceh telah menjadi sumber ilmu pengetahuan sehingga lahir sarjana-

¹⁹ Jalaluddin Rakhmat, 1988, *Psikologi Komunikasi*, CV Remadja Karya, hlm. 289.

sarjana yang terkenal di dalam dan luar negeri. Maka, semakin banyaknya pemuda yang membutuhkan ilmu pengetahuan, mereka datang dari segala penjuru beramai-ramai datang ke Aceh. Karena dipimpin oleh kebijakan yang berpengetahuan pula, jadinya Aceh telah mashur, berjaya, dan terkenal seantero dunia.” Kemajuan pesan bidang ilmu pengetahuan masa itu dipengaruhi atas kebijakan langsung Ratu Safiatuddin mengenai karya-karya keagamaan para ulama baik ilmu fikih, hadis, dan ilmu penafsiran. Misalnya Abdurrauf As-Singkili dan Nuruddin Ar-Raniri keduanya sangat aktif menulis. Karya-karyanya meliputi *Tibyan fi al-Adyan*, kitab ini menjelaskan perdebatan kaum Wujudiyah dengan Sultan Iskandar Tsani. Artinya, Sultan Safiatuddin berani memberi ruang baru dengan tidak mencaci maki paham wujudiyah. Tetapi ia melalui karya ulama ‘melawan’ paham wujudiyah itu. Kitab terkemuka lainnya yaitu *Akhbar al-Akhirat fi Ahwal al-Qiyamat*, salah satu kitab yang amat dibaca dan terkenal. *Maal-Hayat li Ahl al-Mamat*, khusus ditulis atas permintaan Ratu Safiatuddin. Isinya pula masih membahas tentang ajaran Wujudiyah terkait kesatuan Alam dengan Tuhan.

2. Penguatan Hukum

Dalam ranah hukum, Undang-Undang Meukuta Alam²⁰ yang disusun Sultan Iskandar Muda. Jika pada masa kepemimpinan Sultan hanya menindaklanjuti, namun Sultanah Safiatuddin melakukan serangkaian perubahan sesuai dengan kebutuhan pada zaman itu. Undang-Undang yang disebut dengan *qanun* ini telah menjelaskan bentuk dan dasar negara adalah Islam dengan Sultan sebagai pemimpin tertinggi. Bahkan dijelaskan pula, Raja boleh berasal dari keluarga kerajaan. Spesifik lainnya yaitu kepala negara memiliki sekretaris negara bergelar *Rama Setia Kerukan Katibul Muluk*. Selanjutnya orang kedua dalam kerajaan yaitu *Qadhi Malikul Adil* dengan empat pembantunya yang bergelar *Mufti*. Kemudian, untuk membantu Sultan menjalankan roda pemerintahan maka, dalam *qanun* ini pula telah menetapkan pejabat tinggi bergelar *Wazir* atau dikenal dengan sebutan Perdana Menteri dan Menteri. Selain urutan pemerintahan Sultanah dan dibawahnya, *qanun* ini mengatur pula bahwa *Qadhi Malikul Adil* memegang kekuasaan hukum (yudikatif), Sultan memegang kekuasaan adat (eksekutif), sementara itu kekuasaan *qanun* (legislatif) sendiri dipegang oleh Majelis Hakim

²⁰ Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam*.

Rakyat. Terakhir, kekuasaan *reusam* (hukum darurat) diberi kewenangan kepada penguasa tunggal, sehingga Sultan selaku penguasa tertinggi, dalam waktu perang dapat menggunakan hukum ini.

3. Kebebasan Berpendapat

Pada awal menjadi Sultanah, kaum wujudiyah menjadi garda depan menolak kepemimpinannya. Tidak hanya di luar pemerintahan, tetapi juga di internal kerajaan yang berambisi menjadi raja. Sultanah mempunyai langkah strategis dalam mengecilkkan polemik ini. Langkah ini meliputi mengumpulkan ulama dan pembesar kerajaan untuk membahas status raja dipimpin oleh seorang perempuan. Karenanya, Qadhi Malikul Adil, Syekh Nuruddin Ar-Raniri mengadakan musyawarah penobatan raja. Ulama dan Ulee Balang akhirnya bersepakata menentukannya sebagai ratu perempuan pertama dalam Kerajaan Aceh Darussalam. Kendati adanya penolakan, Ratu Safiatuddin berani mendobrak skema lama yang mengharuskan bahwa yang memimpin adalah seorang laki-laki. Mengenai paham wujudiyah yang berseberangan pendapat dengan Ratu, terkhusus mengenai boleh tidaknya kepemimpinan wanita, melalui As-Singkili Ratu menunjukkan sikap toleransinya yang tinggi. Sikapnya yang arif dan penuh *tasamuh* terhadap paham wujudiyah tidak terlalu mempersoalkan penolakannya. Bahkan Ratu memberikan kebebasan bagi para ulama dan penganut wujudiyah ini untuk mendirikan dayah selalu tempat menimba ilmu mereka. Selama masih dalam batas wajar dan tidak subversif, Ratu mengiyakan yang mereka kerjakan.

4. Kesetaraan Gender

Kepemimpinan Ratu Safiatuddin juga mencatat rekor baru. Ia berupaya memperbaiki status sosial kaum perempuan. Diantaranya ia membuat aturan bahwa anak perempuan perlu disediakan rumah, adanya undang-undang yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. Melalui kebijakannya yang bernilai humanis itu, ia juga membolehkan perempuan setara dapat bekerja layaknya kaum laki-laki. Termasuk ia memberi porsi khusus jumlah perempuan di Balai Mahkamah Rakyat sebagai lembaga parlemen masa itu. Secara lebih lanjut, pola komunikasi yang dibangunnya terus mendobrak sistem lama. Teramat fenomenal pada masa itu ialah ia memerintahkan Abdurrauf As-Singkili menulis kitab bernama *Mir'at alt-*

Thullab fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam. Isinya ialah membolehkan perempuan menjadi hakim (lebih luas dapat menjadi penguasa). Kitab *Tarjumah al-Mustafid*, karya tafsir Alquran berbahsa Melayu yang menyebutkan pula bahwa perspektif gender mencerminkan kepemimpinan ratu sehingga ia menjadi tokoh reposisi peran perempuan di Aceh Darussalam.

E. Kesimpulan

Kepemimpinan Ratu Safiatuddin diawali dengan pelbagai kontroversi itu sejatinya telah melahirkan paradigma baru. Ruang-ruang nilai yang selama ini masih ambigu bila dipegang oleh kaum perempuan, oleh Ratu Safiatuddin mampu mendobraknya. Sehingga ia dapat bertahan selama rentang waktu 35 tahun lamanya. Tentu tidak mudah, ia harus mempunyai semangat dalam memimpin dan pola kepemimpinan kolaboratif dan komunikatif. Melalui kebijakan-kebijakan yang mengarah pada keberpihakan pada kaum perempuan, ia telah memposisikan wanita setara dengan kaum lelaki. Adanya pendirian Universitas Baiturahman pun telah membentuk dan memberi ruang tidak hanya untuk lelaki tetapi bagi perempuan. Begitu pun adanya kehadiran posisi wanita dalam pemerintahan bagi legislatif dan eksekutif, mendiskreditkan Ratu menjawab setiap tantangan. Perihal penguatan *qanun* Meukuta Alam juga telah memberi konsep dan perspektif baru dalam hal pembaruan sistem pemerintahan dan kekuasaan. Terakhir, kebebasan pendapat juga dijunjung dengan diberikan kebebasan kaum wujudiyah menyebarkan pahamnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Jalil, Tuanku. 1991. *Adat Meukuta Alam*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA).
- Bustaman Ahmad, Kamaruzzaman. 2017. *Islam Histori: Dinamika Studi Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Percetakan Galang Press.
- Cangara, 2011. *Pengantar Ilmu Komuninkasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gea, Z. S., Zulyadi, T., & Nurfahmi, N. (2022). The Effectiveness Of The Role of The Special Job Fair SMK SMTI Banda Aceh in Enhancing Graduates Employability to The Business/Industry World. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 5(1), 51-62.
- Haryanto, Toto. 2019. *Konstruksi Politik Atas Kepemimpinan Perempuan: Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17*. *Jurnal Studi Islam Medina*, Vol. 15 Nomor 2.
- Hasjmy, A. (1977). *59 Tahun Aceh Di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hoesein Djajadiningrat, Raden. (1982/1983). *Kesultanan Aceh*. Daerah Istimewa Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ilaihi, Wahyu. 2010. *Komunikasi Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Miller, K. 2005. *Communication Theories; Perspectives, Processes, and Conteexts*. 2nd Ed, New York: McGraw-Hill.
- Mukarom, Zaenal. 2016. *Komunikasi Politik*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Musthafa, Ibnu. 1993. *Perempuan Islam Menjelang Tahun 2000*. Bandung: Al-Bayan.
- Nimmo, Dan.1993. *Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media*, terj. Jalaluddin Rakhmat. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nizam, K. (2021). The Role And Authority Of Queen of Aceh And Sultan of Perak To Deal With The Dutch In The Tin Trade Issues. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(1), 1-14.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1988, *Psikologi Komunikasi*, CV Remadja Karya.
- Sufi, Rusdi. 1994. *Sultanah Safiatuddin Syah, Perempuan Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Jayakarta Agung.